

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyandang disabilitas merupakan suatu keadaan terbatasnya kemampuan untuk melakukan aktivitas normal. Dalam berbagai kasus di masyarakat terdapat hambatan untuk para penyandang disabilitas tubuh yang mengalami masalah dalam mengembangkan kemampuan dan penyesuaian sosialnya. Adapun kesulitan tersebut disebabkan oleh keterbatasan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, pendidikan, dan rendahnya penilaian masyarakat terhadap kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas tubuh sehingga menyebabkan kurangnya percaya diri, minder dan merasa tidak berguna (Lauster, 2006).

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada 2018, terdapat 14,2 persen penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas atau 30,38 juta jiwa. Dengan banyaknya jumlah penyandang disabilitas tersebut, terdapat berbagai kasus dan hambatan yang didapat oleh penyandang disabilitas, maka pemerintah kementerian sosial memberikan program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas. Rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah untuk menjalankan programnya adalah dengan mendirikan Balai Rehabilitasi dan Pelatihan Vokasional bagi Penyandang Disabilitas (BBRVPD). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 52 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas, balai pelatihan tersebut memiliki tujuan dan fungsi untuk memberikan motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental dan spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, melakukan resosialisasi, bimbingan lanjut dan penyaluran. Selain itu rehabilitasi sosial juga memberikan layanan terapi fisik, terapi mental dan spiritual, terapi psikososial, dan terapi penghidupan keberlanjutan

Dengan berpedoman pada prinsip yang telah ditetapkan oleh *International Labour Organization (ILO) 86th Session* 1998 tentang Rehabilitasi Kejuruan dan Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas yaitu balai rehabilitasi vokasional harus dapat memenuhi pengelolaan yang kompeten, dan terpenuhinya kebutuhan para penyandang disabilitas saat melakukan pelatihan di balai, dari mulai kebutuhan fisik sampai psikologisnya. Pemerintah juga mengharapkan para pengelola mampu untuk bekerjasama dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau swasta agar dapat memberikan dukungan secara langsung dalam rangkaian pelatihan vokasional.

Untuk meningkatkan keberhasilan program rehabilitasi vokasional tersebut, maka balai rehabilitasi ini harus mampu memenuhi fungsi dan tujuan layanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari banyaknya tujuan dan fungsi pada balai rehabilitasi vokasional, balai tersebut belum bisa menjalankan visinya dengan baik, karena beberapa fasilitas dan layanan yang belum terpenuhi, yaitu kurangnya fasilitas rehabilitasi baik medis maupun psikologis, diantaranya adalah kurangnya area untuk layanan terapi fisik dan sensorik, hal tersebut menyebabkan ketidakterediaan peralatan yang lengkap untuk layanan terapi sensorik dan fisik. Sehingga dapat menghambat perkembangan potensi yang dimiliki secara berkualitas untuk menuju kemandirian dan memberikan pelayanan yang optimal pada kegiatan rehabilitasi yang dijalankan.

Selain Ketidakterseediaannya layanan dan fasilitas terapi bagi siswa penyandang disabilitas, fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada balai tersebut juga belum memenuhi standar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Menurut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, No. 468/KTPS Tahun 1998 Tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan, Dalam merencanakan, dan melaksanakan pembangunan bangunan umum dan lingkungannya, harus dilengkapi dengan penyediaan aksesibilitas bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas. Setiap orang atau badan termasuk instansi Pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan umum dari lingkungan wajib memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas yang diatur dalam

Keputusan Menteri ini.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa perancangan ulang pada balai rehabilitasi vokasional tersebut perlu dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan perencanaan yang dapat diimplementasikan oleh penyelenggara atau pelaksana baik jangka panjang, jangka menengah maupun rencana kerja tahunan untuk mewujudkan balai rehabilitasi vokasional yang kompeten dan memiliki kualitas yang baik. Berdasarkan hasil pengamatan, tidak terpenuhinya kemudahan dari para siswa penyandang disabilitas saat melakukan kegiatan, karena sebelumnya balai tersebut tidak memiliki pendekatan desain, sehingga tidak mencerminkan perancangan yang di khususkan untuk para penyandang disabilitas. Maka pedekatan yang sesuai adalah menggunakan pendekatan universal desain, karena prinsip yang ada pada pendekatan tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kegiatan pada balai besar rehabilitasi vokasional, pada balai rehabilitasi vokasional ini terdapat dua pengguna yang berbeda yaitu pengguna normal dan pengguna disabilitas yang harus disetarakan, dengan memperhatikan standar yang telah ditentukan. sehingga langkah-langkah dalam perancangan ulang ini dapat dilaksanakan dengan mewujudkan pelayanan yang optimal, efektif dan efisien.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari hasil survey dan observasi secara langsung mendatangi balai tersebut, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang dapat diangkat dalam perancangan ulang interior serta fasilitas aksesibilitas pada balai rehabilitasi vokasional tersebut yang ramah saat digunakan oleh para pengguna utama yaitu para penyandang disabilitas :

1. Perancangan interior yang dapat memperbaiki fungsi dan layanan pada balai besar rehabilitasi vokasional agar dapat meningkatkan kinerja pada pengguna balai tersebut.
2. Perancangan interior yang dapat memenuhi visi pada balai besar rehabilitasi vokasional, sehingga dapat menghasilkan balai yang kompeten dan memiliki kualitas yang baik.

3. Perancangan Interior Balai Besar Rehabilitasi Vokasional menggunakan pendekatan desain universal untuk memberikan fasilitas dan aksesibilitas yang setara, aman, dan nyaman bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas.

1.3 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan permasalahan yang telah teridentifikasi diatas, maka rumusan masalah dari perancangan ulang interior Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Penyandang Disabilitas Cibinong adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mendesain balai rehabilitasi yang dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas pada pengguna balai tersebut?
2. Bagaimana mendesain perancangan elemen interior yang dapat meningkatkan kualitas pada balai tersebut?
3. Bagaimana mendesain perancangan yang aman, nyaman dan dapat digunakan oleh semua kalangan baik pengguna normal maupun penyandang disabilitas?

1.4 Tujuan dan Sasaran Perancangan

Dalam melakukan sebuah perancangan ulang interior diperlukannya tujuan serta sasaran perancangan yang nantinya akan menjadi solusi dari permasalahan – permasalahan yang terdapat di balai tersebut dan menjadi hal utama dari dasar perancangan yang akan dilakukan.

1.4.1. Tujuan Perancangan

Melakukan perancangan ulang interior Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Penyandang Disabilitas Cibinong, dengan menggunakan pendekatan desain universal dalam interior yang akan diterapkan pada elemen interior dan fasilitas yang ada pada balai tersebut dengan menggunakan prinsip – prinsip desain universal agar terwujudnya efektivitas dan produktivitas dalam melaksanakan kegiatan pada balai rehabilitasi vokasional tersebut.

1.4.2. Sasaran Perancangan

Sasaran perancangan merupakan upaya yang akan dilakukan untuk memenuhi tujuan dari perancangan re desain yang akan dilakukan, sasaran pada perancangan

ulang balai ini antara lain:

1. Memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna utama balai ini, yaitu para penyandang disabilitas serta para pengelola balai tersebut.
2. Memberikan kesan positif untuk para disabilitas agar tetap termotivasi saat melakukan rehabilitasi vokasional di balai tersebut.
3. Mempermudah para penyandang disabilitas untuk dapat melakukan aktivitas secara mandiri dengan aman tanpa bantuan siapapun.
4. Memperjelas identitas balai ini sebagai balai rehabilitasi untuk para penyandang disabilitas.

1.5 Batasan Perancangan

Fokus perancangan ulang interior yang dilakukan pada Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Penyandang Disabilitas di Cibinong. Batasan Perancangan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Batasan Luasan

Perancangan ulang interior pada balai rehabilitasi tersebut memiliki luasan 12.921m².

2. Batasan Lokasi

Lokasi Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Penyandang Disabilitas tersebut berada di Jl. SKB Karadenan, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16913.

3. Batasan Pengguna Ruang

Pengelola Balai Rehabilitasi tersebut memiliki 122 pegawai yang memiliki rentan usia 25-60 Tahun dengan 177 pegawai dengan kondisi normal dan 5 pegawai penyandang disabilitas. Pengguna balai lainnya adalah siswa penyandang disabilitas (Tuna Netra, Tuna Daksa, Tuna Rungu, dan Tuna Wicara) yang memiliki rentan usia 18-25 tahun. Penerimaan siswa setiap semester berkisar 100-120 siswa disabilitas yang diterima.

4. Batasan Kebutuhan Ruang

Pada perancangan ulang interior balai rehabilitasi ini terdapat fasilitas berupa ruang utama sebagai pemenuhan kebutuhan pekerja dan fasilitas tambahan untuk aktivitas penunjang.

No	Nama Ruang	Luasan	Jumlah
1	Ruang Kepala Balai	32m ²	1
2	Ruang Kepala Bidang	25m ²	4
3	Ruang Staff	216m ²	4
4	Lobby	144m ²	1
5	Gedung Serba Guna	630m ²	1
6	Ruang Makan	360m ²	1
7	<i>Kitchen</i>	144m ²	1
8	Ruang Pelatihan	m ²	6
9	Poliklinik	36m ²	1
10	Pos Satpam	18m ²	1
11	Kantin	54m ²	1
12	Asrama	151m ²	6

Table 1.1 Kebutuhan Ruang

1.6 Manfaat Perancangan

Dalam suatu perancangan bangunan tentunya terdapat beberapa dampak positif bagi beberapa pihak. dampak positif yang ditimbulkan dari perancangan ini berupa manfaat yang akan didapat:

1. Pengguna (para penyandang disabilitas)

Dengan perancangan ulang yang akan dilakukan pada balai ini diharapkan para pengguna utama atau para penyandang disabilitas dapat beraktivitas dengan nyaman dan aman didalam balai tanpa bantuan siapapun, sehingga para siswa disabilitas mampu bekerja secara mandiri setelah lulus dari balai rehabilitasi ini ke perusahaan – perusahaan yang akan merekrut mereka.

2. Institusi

Dengan perancangan re desain yang akan di lakukan pada balai ini dapat menciptakan pemahaman yang baik terhadap tata desain ruang dalam, memperbaiki fungsi, meningkatkan aspek psikologi, menegaskan fungsi utama balai ini, dan memperkaya nilai estetik yang ada pada balai ini.

3. Penulis

- Merupakan salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Desain Interior Telkom University, Bandung
- Dapat menambah wawasan mengenai interior Rehabilitasi Sosial untuk semua Penyandang Disabilitas
- Dapat memecahkan masalah yang ada di dalam proses perencanaan dan perancangan ulang interior, dengan menerapkan gagasan dan ide yang terbentuk.

1.7 Metode Perancangan

Dalam perancangan ulang balai ini metode perancangan yang digunakan adalah menggunakan data primer yang dilakukan dengan cara survey dan observasi secara langsung ke balai tersebut, dan menggunakan data sekunder dengan melihat standarisasi dan peraturan pemerintah yang telah ditentukan.

1.7.1 Penentuan Objek

Penentuan objek dilakukan berdasarkan fenomena yang ada pada balai tersebut, penentuan objek ditentukan dengan cara pengamatan, kuesioner, survey langsung, wawancara beberapa pengelola dan siswa yang ada pada balai tersebut.

1.7.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dihasilkan melalui 2 data yaitu data utama dan data tambahan yang menjadi landasan dan acuan perancangan yang akan dilakukan.

a. Data Utama

Data utama adalah data pokok yang dibutuhkan dan harus dipenuhi sebagai dasar perancangan proyek ini. Data utama tersebut merupakan site, data perusahaan, data survey dan observasi desain terkait dengan objek yang akan dirancang, data tersebut diperoleh melalui pengunjungan langsung, pengukuran, analisis, serta melakukan 3 studi banding dari 3 Pusat rehabilitasi dan vokasional yang ada di beberapa negara. Pengumpulan data preseden yang dihasilkan sesuai dengan objek pendekatan yang digunakan melalui metode pengamatan, kuesioner, dan metode wawancara.

b. Data Tambahan

Data tambahan adalah data yang dibutuhkan sebagai data acuan perancangan. Data ini merupakan data literatur yang digunakan, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172/PMK.06/2020 tentang standar barang dan standar kebutuhan milik negara, Buku Standar dan Implementasi desain Universal pada bangunan Gedung dan lingkungan Baju Arie Wibawa dan Kurnia Widiastuti.

1.7.3 Analisa Data

Analisa data adalah metode proses data yang menggunakan data utama sebagai landasan pokok yang dikaji dengan data tambahan yang digunakan sebagai acuan. Dari proses data tersebut dapat menyelesaikan masalah - masalah umum yang terdapat pada site. Solusi yang dihasilkan melalui pengkajian standar, teori, dan peraturan pemerintah berupa kebutuhan ruang, *zoning, blocking*, alur sirkulasi, *flow activity*, hubungan antar ruang, table kebutuhan ruang dan table komparasi

data survey yang dihasilkan 3 Pusat rehabilitasi dan vokasional yang ada di beberapa negara. Dari data tersebut mengasilkan kurangnya fasilitas layanan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta ketidaknyamanan dalam beraktivitas.

1.7.4 Menentukan Ide Gagasan

Menentukan ide gagasan dari objek yang akan dirancang merupakan hasil analisa data yang menghasilkan ide dan gagasan berupa konsep yang akan menjadi solusi dari permasalahan umum dan permasalahan khusus yang ada. Tema perancangan sebagai landasan utama pada proyek, dan pendekatan perancangan sebagai karakteristik proyek.

1.7.5 Penerapan Ide Gagasan

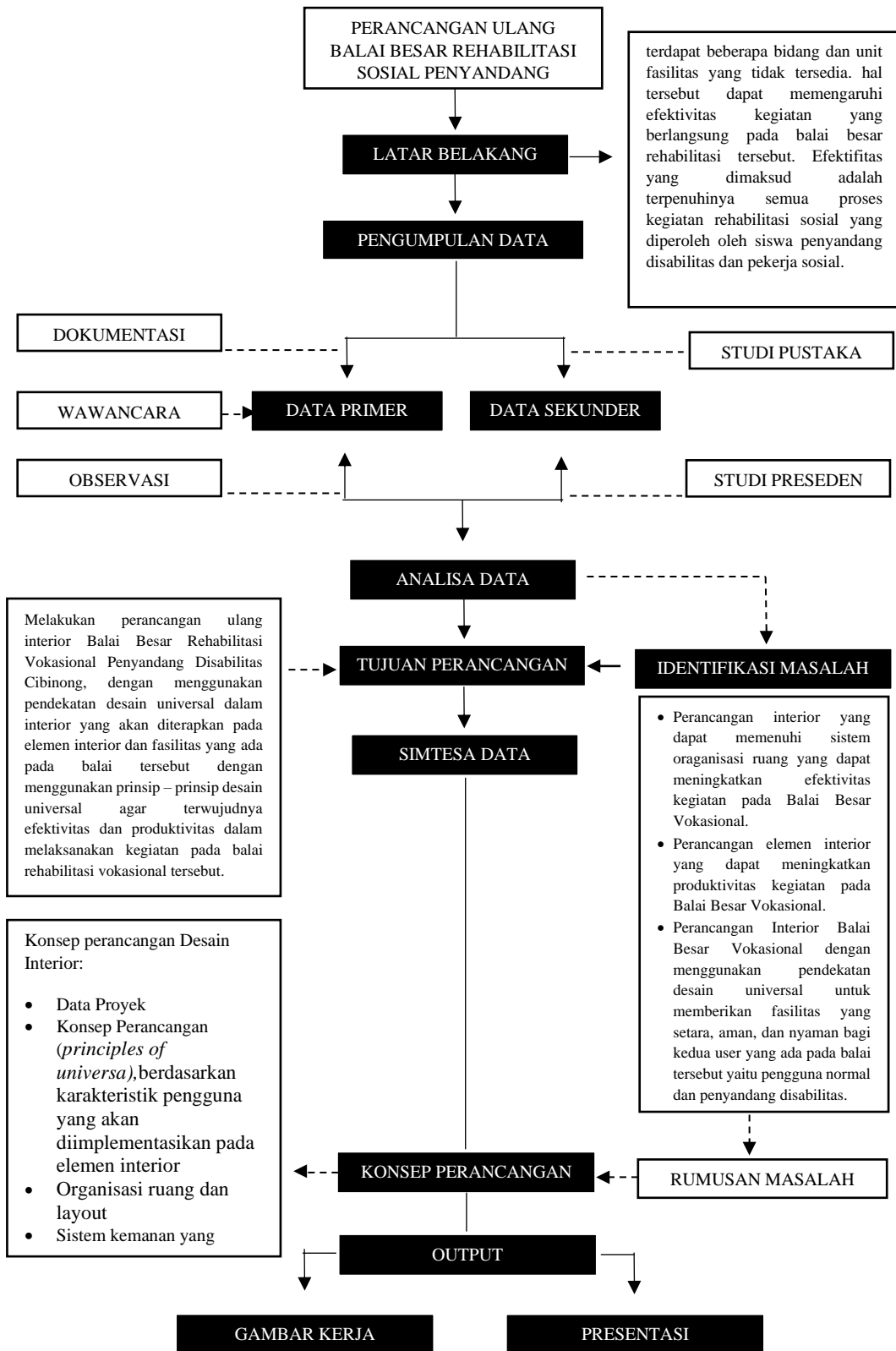
Penerapan ide gagasan dalam perancangan mengimplementasikan beberapa alternatif untuk menemukan solusi desain yang baik dan tepat untuk proyek

tersebut. Alternatif yang dihasilkan berupa layout yang menggunakan AutoCad 2019 dan 3D menggunakan *software* sketchup.

1.7.6 Hasil Akhir Perancangan

Hasil akhir perancangan yang didapatkan sebagai tujuan utama dari perancangan proyek ini berupa lembar kerja dengan denah umum dan denah khusus berwarna, Rencana Lantai denah khusus, Rencana plafon denah khusus, Rencana ME denah Khusus, Potongan, Tampak, Detail mebel, Detail Interior, visual 3d, skema bahan dan material, dan visual animasi 3d.

1.8 Kerangka Berpikir



Bagan 1.1 Kerangka Berpikir

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi uraian-uraian latar belakang pengangkatan perancangan ulang interior, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, manfaat perancangan, ruang lingkup dan batasan masalah, metode perancangan, kerangka berfikir, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN LITERATUR DAN DATA PERANCANGAN

Berisi uraian-uraian mengenai kajian literatur mulai dari balai rehabilitasi secara umum serta kajian literatur mengenai pendekatan,

BAB III : KONSEP PERANCANGAN DESAIN INTERIOR

analisa studi kasus bangunan sejenis, dan analisa data proyek.

BAB IV : KONSEP PERANCANGAN VISUAL DENAH KHUSUS

Berisi uraian-uraian tema perancangan, konsep perancangan, organisasi ruang, layout, bentuk, material, warna, pencahayaan dan penghawaan, keamanan dan akustik beserta pengaplikasiannya pada Kantor.

Berisi uraian-uraian mengenai pemilihan denah khusus, konsep tata ruang, persyaratan teknis ruang dan elemen interior.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bagian akhir dari penulisan laporan yang berisi tentang kesimpulan & saran.